

Tantangan Politik, Sosial, dan Ekonomi dalam Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat serta Potensinya dalam Perlindungan SDA.

AGUSTINUS KASTANYA

Guru Besar manajemen/perencanaan hutan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

DISKUSI PUBLIK VIRTUAL SERI PERINGATAN HARI HUTAN INDONESIA, HARI MASYARAKAT ADAT, DAN HARI KEMERDEKAAN RI DENGAN TEMA "BAHU-MEMBAHU DALAM MEMPERCEPAT PENGESAHAN RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL, EKONOMI, DAN EKOLOGI DI INDONESIA"


Madani

6 Agustus 2021

FOKUS PEMBAHASAN

- I. TANTANGAN POLITIK, SOSIAL DAN EKONOMI
- II. PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RUU MASYARAKAT ADAT/MHA
- III. KENDALA DAN PERCEPATAN PENGESAHAN RANCANGAN UU MASYARAKAT HUKUM ADAT
- IV. PERANAN MASYARAKAT ADAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGI
- V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. TANTANGAN POLITIK, SOSIAL DAN

EKONOMI

THE ISORAMBLE FOR LAND RIGHTS " (NOTESS. L, et all WRI, 2017):

"Mengurangi Ketimpangan antara Komunitas Adat dan Perusahaan": ada 4 hal pokok: Tanah sebagai aset penting bagi masyarakat; Masyarakat Adat Sulit untuk mendapatkan Hak; Perusahaan/Investore lebih mudah dan cepat; Menyamakan kedudukan Masyarakat dan perusahaan, mengakui seluruh hak adat, membangun transparansi, menyiapkan regulasi yang sederhana

- ▶ Hasil inkuiri Nasional menemukan: Telah terjadi pelanggaran HAM atas masyarakat Adat & tidak ada kemauan baik pemerintah
- ▶ Hasil kajian Komnas Ham dalam penulisan Standard Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia Tentang Tanah Dan SDA

DAMPAK POLITIK, SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGI



Kerusakan Lingkungan



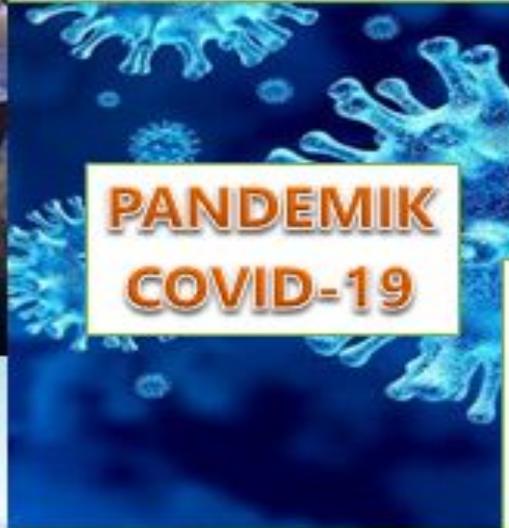
KRISIS AIR



KRISIS PANGAN

**RESIM UU EKSPLOITATIF
SEBELUM UU NO.11,
CIPTA KERJA**

**ANCAMAN
KESEHATAN
DUNIA**



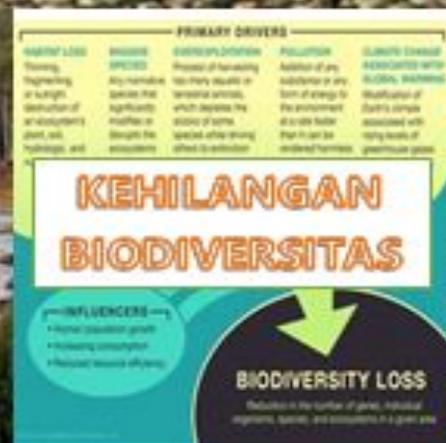
**PANDEMIK
COVID-19**

**HANCURNYA
BISNIS DAN
RESESI**

EKONOMI



DEFORESTASI



**KEHILANGAN
BIODIVERSITAS**



**Perubahan
Iklim**

**HANCURNYA EKOSISTEM LAUT
PERLU Perubahan
PARADIGMA**

III. PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RUU MASYARAKAT ADAT/MHA

- ▶ Dorongan untuk mempercepat pengesahan RUU MHA telah bermunculan, namun prosesnya masih sangat lambat. RUU MHA telah masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional) pada tahun 2013, 2017, dan 2020. Namun, pengesahan RUU MHA masih terhambat oleh UU lain. Tahun ini, RUU MHA kembali masuk ke dalam Prolegnas Prioritas dan saat ini masih berada dalam tahapan harmonisasi. Pelibatan masyarakat masih kurang
- ▶ Beberapa catatan perkembangan pembahasan RUU MHA terlihat seperti ada kesungguhan di DPR tetapi akhir-akhir ini belum menunjukkan hasil yang nyata
- ▶ DPR telah memutuskan 33 RUU untuk proleknas tahun 2021, dan RUU MHA tercatat pada urutan ke 18. Proses politik dalam pengalaman tidak dapat memberikan kepastian
- ▶ Berbagai konsultasi yang dilakukan ke berbagai elemen masyarakat sipil selama ini termasuk selama masa pandemi Covid-19 masih belum dirasakan sebagai konsultasi yang “murni”. Apabila dilihat dari konsep tingkatan partisipasi publik.
- ▶ Seluruh komponen masyarakat harus bekerja keras untuk dapat memastikan kemauan baik Pemerintah dan proses-proses politik di DPR-RI untuk memastikan bahwa UU MHA bisa ditetapkan dengan baik sesuai kebutuhan Masyarakat Adat

IV. KENDALA DAN PERCEPATAN PENGESAHAN RANCANGAN UU MASYARAKAT HUKUM ADAT

- ▶ Kendala utama dilihat dari proses penetapan RUU MHA terletak pada kemauan baik Pemerintah dan proses politik di DPR-RI
- ▶ Dalam proses politik kepentingan aktor non negara (pengusaha/investor) cukup besar mempengaruhi proses-proses tersebut, walaupun itu tidak kentara (bisa melalui individu, kebijakan dan partai politik).
- ▶ Rancangan UU MHA dalam banyak hal masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan ini masih syarat dengan berbagai kepentingan. In diperlukan upaya bersama secara strategis sehingga RUU MHA yang ditetapkan bisa menjamin kebutuhan masyarakat adat
- ▶ Tata kelolah pemerintahan yang berlangsung selama kemerdekaan sampai saat ini, tidak diprioritaskan untuk masyarakat adat dan sudah terjadi tumpang tindih terutama menyangkut lahan dan sumber daya alam. Konflik yang terjadi secara masif membuat kendala utama dalam proses penetapan RUU MHA
- ▶ Seluruh masyarakat sipil, pemerintah, aktor-aktor politik, para pengusaha harus menyadari krisis yang terjadi saat ini (Politik, Sosil, Ekonomi dan ekologi) telah meruntuhkan seluruh tatanan kehidupan
- ▶ Kesadaran ini penting untuk ada kemauan baik dalam melihat masyarakat Adat yang tersebar di seluruh nusantara yang memiliki peranan penting dalam pemulihan seluruh krisis yang terjadi saat ini

V. PERANAN MASYARAKAT ADAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL, EKONOMI DAN

EKOLOGI

- ▶ Politik pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat, telah memberi dampak yang besar baik itu dampak politik, sosial, ekonomi dan ekologi
- ▶ Penyelesaian dampak ini hanya dengan memberi akses kepada masyarakat adat melalui penetapan RUU MHA yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Masyarakat adat dan masyarakat lokal mendiami seluruh wilayah di Nusantara yang saat ini sangat termarginalisasi
- ▶ Kesadaran untuk memulihkan masyarakat adat saat ini terletak pada peranan pemerintah, para politisi dan para pengusaha yang dapat bersama-sama dengan kekuatan masyarakat sipil yang selama ini berjuang dengan masyarakat adat, untuk dapat menetapkan RUU MHA untuk memulihkan krisis yang terjadi saat ini
- ▶ Masyarakat adat memiliki hukum adat dan kearifan lokal yang dijaga secara turun temurun untuk konservasi alam, untuk pemanfaatan/pengelolaan alam dengan lestari untuk kepentingan kehidupan sosial mereka dan menjaga keutuhan ekologi wilayah yang mereka tempati
- ▶ Upaya pembangunan Desa, Perhutanan sosial, investasi swasta yang dapat dikembangkan secara terintegrasi untuk pemberdayaan masyarakat adat dan lokal merupakan kekuatan masyarakat untuk memulihkan krisis yang menghancurkan saat ini

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- ▶ Politik pembangunan Indonesia selama kemerdekaan telah memarginalisasi masyarakat adat dan berpihak pada pengusaha sehingga menghasilkan krisis Politik, Sosial, Ekonomi dan Ekologi. Hal ini memerlukan kesadaran kolektif untuk membenahi tata kelola pemerintahan untuk memulihkan Krisis tersebut
- ▶ Keseriusan Pemerinta dan para politisi di DPR-RI dan ketulusan para pengusaha dan berbagai konspirasi yang berlangsung selama ini dalam proses pilitik yang tidak transparan dan dalam sejarah yang panjang untuk menetapkan RUU MHA sebaiknya diakhiri dan secara serius dengan kesadaran penuh untuk menetapkan RUU MHA dengan sebaiknya dan sejujurnya
- ▶ Penetapan RUU MHA adalah sangat penting untuk memberi akses yang sesungguhnya bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya alam. Seluruh tata kelola pemerintahan yang sudah di arahken kepada masyarakat terus dibenahi dan difokuskan pada masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pemberdayaan mereka
- ▶ Seluruh investor/investasi yang ada di wilayah Masyarakat adat harus mempunyai kesadaran penuh untuk dapat bermitra dengan Masyarakat adat dan memulihkan kondisi sosial, ekonomi dan ekologi secra benar bukan dengan cara rekayasa.

A group of people, mostly men, are gathered in a dense forest. They are wearing red headbands and some are wearing red and white clothing. They appear to be engaged in a traditional ritual or ceremony. The forest is lush with green foliage and large trees. The text 'TERIMA KASIH' is overlaid in white, 'THANK YOU' in yellow, and 'TABEA' in red.

TERIMA KASIH

THANK YOU

TABEA

Masyarakat Adat Sabuai, Kabupaten Seram Timur sedang melakukan ritual adat Sasi Pohon di Hutan Negeri Sabuai. Karena konflik dengan perusahaan